IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KESEPAKATAN KONSERVASI PEKON (KKP) UNTUK MEWUJUDKAN SDGs VILLAGE

Skripsi

Oleh

ALING MAI LINDA SARI PUTRI

(NPM 1716041043)

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2021

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KESEPAKATAN KONSERVASI PEKON [KKP] UNTUK MEWUJUDKAN SDGs VILLAGE

Oleh

Aling Mai Linda Sari Putri

Mengkolaborasikan Kesetaraan Gender dan Konservasi Hutan adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan Tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam kegiatan konservasi hutan yang berbasis *gender equality*, yang dimuat dalam Kesepakatan Konservasi Pekon dapat menjadi solusi bagi masyarakat Pekon Sukamarga untuk permasalahan terkait dengan Konservasi lingkungan dan Peningkatan ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan manfaatnya dalam pengelolaan hutan untuk mewujudkan SDGs *Village*. Adapun fokus dalam penelitian ini yakni mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses dan pemetaan yang dilakukan tentang sumberdaya, kemampuan aktor, dan pembagian tugas pokok dan fungsi dalam prosesnya. Serta menganalisis perubahan yang dapat dilihat setelah dan sebelum adanya penerapan kebijakan pengarusutaam gender dalam pengelolaan hutan pada kesepakatan konservasi pekon [KKP]. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder yang mana pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan gender equality yang di masukan dalam Kesepakatan Konservasi Pekon telah berhasil menjadi solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan hutan dan konservasi lingkungan selama ini.

Kata Kunci : *Gender Equality*, Konservasi Lingkungan, *SDGs Village*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GENDER MAINSTREAMING POLICY IN CONSERVATION PEKON AGREEMENT [KKP] TO REALIZE SDGs VILLAGES

By

Aling Mai Linda Sari Putri

Collaborating on Gender Equality and Forest Conservation is one way that can be taken to realize the Sustainable development Goals. In forest conservation activities based on gender equality, what is contained in the Pekon Conservation Agreement can be a solution for the Sukamarga Village community for problems related to environmental conservation and community economic improvement. The purpose of this study was to analyze the implementation of Gender Mainstreaming Policies and their benefits in forest management to realize the SDGs Village. The focus of this research is to identify the network of actors involved in the process and the mapping carried out on resources, actor capabilities, and the division of main tasks and functions in the process. As well as analyzing the changes that can be seen after and before the implementation of gender mainstreaming policies in forest management in the Pekon Conservation Agreement [KKP]. This research method uses qualitative research, the types of data collected are primary and secondary data in which data collection uses documentation, observation and interview techniques. The results of the study show that the gender equality activities included in the Pekon Conservation Agreement have succeeded in becoming a solution to the problems found in forest management and environmental conservation so far.

Keywords: Gender Equality, Environmental Conservation, SDGs Village

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KESEPAKATAN KONSERVASI PEKON (KKP) UNTUK MEWUJUDKAN SDGs VILLAGE

Oleh

ALING MAI LINDA SARI PUTRI

(NPM 1716041043)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Adminstrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2021

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KESEPAKATAN KONSERVASI PEKON[KKP] UNTUK MEWUJUDKAN *SDGs VILLAGE***

Nama Mahasiswa : *Aling Mai Linda Sari Putri*

No. Pokok Mahasiswa : **1716041043**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Assoc. Prof.Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.	**Dodi Faedlulloh , S.sos., M.Si.**
NIP. 19720918 200212 2 002	NIP. 19880712 201903 1012

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Assoc. Prof.Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.**

Sekretaris : **Dodi Faedlulloh, S.sos., M.Si.**

Penguji Utama : **Assoc. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Oktober 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 24 Desember 2021
Yang membuat pernyataan,

Aling Mai Linda Sari Putri
NPM 1716041043

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Aling Mai Linda Sari Putri, lahir di Rejo Binangun pada tanggal 10 Mei 2000. Penulis adalah puteri dari pasangan Bapak Aceng Sukadi dan Ibu Muryati dan merupakan anak pertama dan memiliki dua orang saudara laki-laki, Zaki Afriansyah dan Mufaza Kalandra Jefriansyah.

Sebelum menyelesaikan masa pendidikan di jenjang sarjana, penulis telah menyelesaikan pendidikan formal dimulai dari pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Rejo Binangun yang diselesaikan tahun 2011, pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Raman Utara yang diselesaikan tahun 2014 dan terakhir pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kota Gajah yang diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Pada tahun 2020, penulis melaksanakan Kuliah Kerha Nyata (KKN) di Desa Rantau Fajar Kabupaten Lampung Timur serta mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di NGO World Wide Fund for Nature. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif pada organisasi internal kampus yakni sebagai Staf Ahli Sekertaris Kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung tahun 2017-2018, Kepala Bidang Sumber Daya Organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara tahun 2019-2020. Sebagai Penanggungjawab Temu Mahasiswa Administrasi Negara Seluruh Indonesia tahun 2021, Koordinator Campaign Flora dan Fauna World Wide Fund for Nature [WWF] tahun 2020, Sebagai Narasumber Sosialisai Digital Tourism dann Comunity Based Tourism di Pesisir Barat tahun 2021. Penulis juga sempat mengikuti kegiatan pada organisasi eksternal kampus yakni Peserta Sertifikasi International Comunication Skill dan Digital Indonesia Next tahun 2018, Peserta Empowering Merajut asa Entikong, Labuhan Bajo NTT 2019 dan Peserta Model United Nations Turkey tahun 2020. Penulis juga merupakan salah satu penulis cerita anak dan novel di Yayasan Manik Bumi.

MOTTO

" Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya"
(Q.S Al-Baqarah: 286)

Semua yang indah belum tentu baik, tapi semua yang baik sudah tentu indah
(Aling Mai Linda Sari Putri)

Prosesmu berbeda, karena kamu ditakdirkan untuk lebih unggul dari yang lain. Menghargai proses adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Perihal cinta, tidak usah terburu-buru. Cintai diri sendiri terlebih dulu, perihal sedih pasti berlalu, tenang bahagia pasti datang. Jangan pernah biarkan pikiranmu, menggertak tubuhmu. Biarkan senyum mu mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyum mu.

(2017, Aling)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skrpsi ini untuk :

Bapak, Makno dan Mamakku tercinta Bapak Aceng Sukadi, Bapak Suyono dan Ibu Muryati

Terimakasih atas segala restu, doa dan pengorbanan yang tak terhingga dalam menuntun langkah ku hingga saat ini, yang selalu menenangkanku saat proses menuju keberhasikanku. Kupersembahkan kelulusan ini untuk kalian sebagai wujud bakti dan janjiku.

Adikku Zaki Afriansyah dan Mufaza Kalandra Jefriansyah

Yang selalu menjadi pelipur lara, penyemangat dan penghibur. Senyum dan tawamu adalah obat lelah hidup ini. semoga kamu bisa mencapai cita-citamu kelak.

Ucapan Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu. Yang telah memberikan dukungan moril dan materi serta do'a
Dan

Do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Para pendidik yang telah membimbing dan mendidik dengan ketulusannya Sahabat, teman, dan almamater tercinta yang mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak serta memberikan pengalaman yang tak terlupakan.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dah hidayat-Nya, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil dihari akhir kelak. Berkat daya dan upaya serta kekuatan yang dianugerahkan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Konservasi Pekon (KKP) Untuk Mewujudkan *SDGs Village*"

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Assoc. Prof. Dr Novita Tresiana, S.sos., M.Si.
   Sekaligus dosen pembimbing utama penulis. Terimakasih atas bimbingan, nasehat, ilmu dan waktu yang telah ibu berikan. Terimakasih banyak, semoga keikhlasan dan ketulusan Ibu dalam mendidik saya selama ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

2. Bapak Dodi Faedlulloh, S.sos., M.Si.. selaku dosen pembimbing kedua penulis,
   Terimakasih banyak atas segala ilmu, bimbingan, motivasi, nasehat waktu yang telah diberikan selama proses bimbingan. Semoga bapak selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal dan semoga terus menginspirasi bagi seluruh mahasiswa.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si Selaku dosen pembahas dan penguji
   Yang telah memberikan ilmu di dalam perkuliahan dan yang telah memberikan masukan serta saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

4. Terimakasih kepada Bu Intan, Bu Meli, Pak Simon, Bu Ani dan seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara tanpa terkecuali, terimakasih atas segala ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti ke depannya.

5. Mba Wulan dan Pak Jo selaku Staf Administrasi yang banyak membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.

6. Terimakasih kepada Kedua Orang Tuaku tercinta dan Adik, yang tak henti hentinya selalu dan selamanya memberikan kasih sayangnya, perhatiannya, nasehatnya, motivasinya, dukungannya, doanya, pengorbanannya dalam segi moril maupun materil untukku, dan dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. Kepada kedua orang tuaku, akhirnya anak gadismu kini telah berhasil menggapai salah satu keinginan dan cita-cita kalian berdua, menyelesaikan study kuliahnya walaupun banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapi.

7. Untuk Ketujuh Pria yang menjadi salah satu alasanku dapat tersenyum setiap pagi yang terbentang jarak nan jauh disana yang selalu ada bersama ku, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook. Terimakasih telah mengajarkan ku bagaimana cara mencintai diriku sendiri, menemaniku saat aku jatuh dan terpuruk sendirian, selalu membuatku tertawa saat aku sedih, membuatku menjauh dari kata insecure, membuat ku percaya diri dengan apa yang aku lakukan, mengajarkan ku untuk berjuang meskipun banyak yang berusaha untuk membuat ku mundur, mengajarkan ku betapa pentingnya tersenyum walupun sedang bersedih, mengajarkan ku betapa diriku ini penting walaupun orang bilang aku tidak berguna. Terimakasih untuk segala usaha untuk membangun keluarga yang bahagia ini.

8. Keluarga Besar Alm. Martojo dan Tuminah dan Keluarga Besar Alm. Nurhayati yang tak henti-hentinya mendoakan dan menanti kelulusanku hingga akhir hayatmu. Terimakasih telah mengajarkanku menjadi gadis kecil yang senyumnya bisa mengubah dunia. Terimakasih banyak selalu mendoakan cucumu ini walaupun dirimu tak sempat melihat namaku disebut bersama gelar di gedung yang megah nanti.

9. Pakde Sunar, Pakde Lan, Pakde So, Pakde Gito, Bude Ti, Bude Srini, Bude Minah, Bude Wiji, dan seluruh sepupu tercinta ku terimakasih atas segala dukungan moril dan materiil yang tak henti-hentinya diberikan kepadaku disaat aku sedang sedih dan kesulitan.

10. Teman terbaikku, SisterHood Oktivia, Kk Sinta, Ema, Indah, Anisa, Marlina, Uppa, Sepni, Refi, Rani dan Kance kentelku Anggun, Dewi Syintia, Aulia Yusro, Viuly Amara, Savira, Masyi, Rika, Kurota, Merda, Manda, Irma, Ratna, Veni, Ginanjar, Ridho, Balqis Chan, Nadia, Dian, dan yang lain yang tidak disebutkan. Terimakasih telah memberikan pengalaman yang luar biasa dalam proses menuju dewasaku, terimakasih selalu ada dan menjadi salah satu alasan bagaimana aku bisa bertahan sampai akhir perjuangan ini.

11. Teman-Teman Asrama Muezza, Tri, Vera, Ami, Dewi, Mba Ita, Mba Tiara, Mba Lia dan semuanya. Terimakasih telah menemaniku ketika begadang harus mengerjakan tugas di sepertiga malam, terimakasih untuk tidak pernah lelah mendobrak kamarku agar aku selalu sahur dan bangun tepat waktu. Serta terimakasih tak terhingga selalu telah bersedia merawatku selama ini.

12. Untuk Bapak dan Ibu Kost ku Tercinta, Terimakasih selalu mengingatkan dan menjaga ketika aku sedang mearntau disini selama ini dan mohon maaf Bu, Pak selalu merepotkan gara-gara aku selalu kehilangan kunci kos. Semoga Bapak dan Ibu Sehat selalu.

13. Sahabat seperjuangan ANGKASA (Angkatan Sembilan Belas Administrasi Negara). Terimakasih untuk pengalaman dan kebersamaan selama ini.

14. Terimakasih untuk abang dan mbak HIMAGARA, terimakasih untuk ilmu tentang dunia perkuliahan, tentang organisasi, tentang berteman, tentang proses pengerjaan skripsi. Terimakasih untuk adik-adik HIMAGARA 2018 - 2019, atas kebersamaannya selama ini atas canda dan tawanya yang diberikan, yang sangat menyenangkan terutama saat hari-hari proses skripsi ini.

15. Adikku tersayang Senja, Septiya, Heriska, Julia, Zanu, Mita, Diavinka, Rahma, Susanti, Rosi, Vita, Dandung, Hendra, Chiesa, Gandi, Krisdi,Keluarga besar SDO Ampera dan yang lain. Terimakasih mau sama-sama belajar dan memberikanku banyak saran yang sangat bermanfaat kedepannya. Semangat untuk kalian, sukses selalu.

16. Keluarga Besar Rantau Fajar Papi dan Mamiku serta Mbah Ku tersayang dan Mba Tika, Bude Minah, Bude Lanjar, Mba Kesi, Pakde Jumangin,

Asna, Bima, Raka, Aisyah, Azzam, Jihan, Salma dan seluruhnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menerima ku dan menjaga ku seperti anak sendiri.

17. Teman-teman KKN ku terkasih, Rosa, Fika, Mando, Adil, Kak Ali dan Kak Frank. Terimakasih atas segala kebersamaan dan pengalaman yang diberikan

Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat kesehatan dan rezeki yangberkecukupan serta balasan yang lebih besar untuk bapak, ibu, dan teman-teman semua atas kebaikan dan bantuannya selama ini. Hanya ucapan terimakasih dan do'a yang dapat penulis berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2021
Penulis,

Aling Mai Linda Sari Putri

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
I. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 RUMUSAN MASALAH 6
1.3 TUJUAN PENELITIAN 6
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 8
2.2. TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK 11
2.2.1 Kebijakan Publik 11
2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan 15
2.3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK 16
2.3.1 Implementasi 16
2.3.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 18
2.4. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUG 25
2.4.1 Kebijakan Pengarusutamaan Gender 25
2.4.2 Kebijakan Penagarusutamaan Gender Dalam Lingkungan 25
2.5. PENGARUSUTAMAN GENDER SDGs 28
2.6. KESEPAKATAN KONSERVASI PEKON (KKP SUKAMARGA) 28
2.7. DESA SDGs 29
2.8. KERANGKA PENELITIAN 30
III. METODE PENELITIAN
3.1. TIPE DAN PENDEKATAN PENELITIAN 33
3.2. FOKUS PENELITIAN 33
3.3. LOKASI PENELITIAN 34
3.4. JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN 35

3.5. INSTRUMEN PENELITIAN 36
3.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 36
3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 37
3.8. TEKNIK KEABSAHAN DATA 39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. HASIL 41
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 41
4.1.2. Gambaran Umum Pekon Sukamarga 42
4.1.3. Keadaan Geografis. 44
4.1.4. Gambaran Umum Penduduk dan Sosial Budaya 44
4.1.5. Penggunaan Lahan 45
4.1.6. Sumber Penghidupan Masyarakat 47
4.1.7. Persepsi Masyarakat Sukamarga terkait Satwaliar 48
4.1.8. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Pekon 48
4.1.9. Mobilisasi pemukiman dari dalam kawasan ke luar kawasan TNBBS. 49
4.2. PEMBAHASAN 50
4.2.1. Indeks perbandingan peran laki-laki dan perempuan dan faktor yang mempengaruhi akses dan kontrol dalam pengelolaan hutan. 50
4.2.2. Profil dan Akses kontrol masyarakat dalam Pengelolaan Hutan 61
4.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akses dan Kontrol dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Rakyat. 64
4.2.4. Keikutsertaan peran Suami-Istri dalam Kegiatan Kelompok 66
4.2.5. Pengetahuan Lokal Suami-Istri dalam Budidaya Tanaman di Lahan Hutan 68
4.2.6. Gambaran tentang program KKP 69
4.2.7. Gambaran Umum tentang Kelompok Satuan Tugas kesepakatan konservasi pekon 72
4.2.8. Implementasi kebijakan PUG dalam Kesepakatan Konservasi Pekon ini didasarkan pada masalah yang seringkali terjadi pada pekon sukamarga yakni ... 76
4.3. PEMBAHASAN 86
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. KESIMPULAN 91
5.2. SARAN 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1 Lahan Potensial Pekon Sukamarga..... 41

2 Presentase pelaku menurut kegiatan Reproduktif..... 45'

3 Curahan waktu kerja RTP dan BT..... 46

4 Presentase kegiatan produktif..... 50

5 Curahan waktu kerja RTP dan BT..... 54

6 Presentase kegiatan sosial kemasyarakatan..... 56

7 Curahan waktu kerja RTP dan BT..... 57

8 Rata-rata Jumlah Curahan waktu kerja..... 59

9 Presentase pengelolaan SDA..... 61

10 Presentase Penguasaan Lahan..... 63

11 Penguasaan Lahan menurut Akses..... 64

12 Kegiatan Kesepakatan Konservasi Pekon..... 79

13 Kegiatan Program KKP..... 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Instrumen Kebijakan..... 1
2. Kerangka Penelitian.....20
3. Balai Pekon.....36
4. Gambar Pekon Sukamarga..... 36
5. Presentase Penggunaan lahan akses rumahtangga..... 62
6. Kegiatan peresmian Kesepakatan Konservasi Pekon dan Satgas.... 67
7. Peta Persebaran Sumber Daya Alam..... 67
8. Observasi pada potensi Ekowisata dan Hutan TNBBS..... 68

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah suatu isu penting yang tak pernah berhenti dibicarakan baik itu oleh negara miskin, negara yang sedang berkembang ataupun negara maju. Meskipun konteks yang dibicarakan ataupun cara yang digunakan untuk melaksanakan berbeda beda pada setiap negara. Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu upaya terus menerus, yang bersifat sistematis dan terencana secara sebagian ataupun keseluruhan komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat disuatu negara, demikian juga yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Pengelolaan sumberdaya hutan, sumberdaya alam, sumber-sumber agraria dan lingkungan hidup memiliki dimensi gender yang sangat kuat, mengingat perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok sosial memiliki berbagai bentuk keterlibatan baik sebagai peramu, pengumpul, pengelola, pengolah, pemanfaat maupun sebagai bagian dari pengambilan keputusan di berbagai tingkatan terkait dengan ragam aktivitas tersebut. Di berbagai kelompok masyarakat di beragam komunitas, perempuan dari beragam latar belakang sosial memiliki bermacam bentuk relasi dengan tanah dan sumberdaya alam. Mereka juga memainkan peran penting dalam mengelola tanah dan sumberdaya hutan serta sumberdaya alam lainnya. Namun, mereka belum tentu memiliki kontrol atas tanah dan sumberdaya alam serta sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di berbagai ranah (lihat Siscawati 2014). Situasi ini terkait erat dengan berlakunya berbagai relasi kekuasaan berbasis gender dan aspek sosial budaya lain di dalam komunitas mereka. Beragam permasalahan yang dihadapi oleh perempuan-perempuan dari berbagai kelompok sosial

(kelompok miskin, kelompok buruh tani, kelompok penggarap, kelompok peramu hutan dan berbagai kelompok sosial lain) yang terdapat di beragam komunitas di tanah air belum menjadi fokus utama dari para pihak yang bekerja untuk isu lingkungan, sumberdaya hutan dan sumberdaya alam lainnya. Tampilnya beberapa perempuan adat sebagai pemimpin gerakan perlawanan masyarakat adat, termasuk perlawanan yang khusus dilakukan oleh perempuan adat, serta perempuan pedesaan dan perempuan lokal lainnya belum diiringi dengan pengakuan sosial atas peran perempuan gerakan perlawanan atas penguasaan sumberdaya hutan, sumberdaya hutan oleh negara maupun pihak non-negara (korporasi, dll). Gerakan sosial belum secara otomatis menempatkan perempuan adat sebagai aktor yang penting untuk dilibatkan. Pada periode awal gerakan lingkungan dan gerakan agraria, yakni akhir 1980-an, yang homogen berjenis kelamin laki-laki (Siscawati 2014).

Terlepas dari terbatasnya perhatian pada aspek gender dalam tata kelola hutan di Indonesia, beberapa kajian menunjukkan bahwa perempuan adat dan perempuan komunitas lokal dari berbagai kelas sosial yang berbeda memiliki beragam bentuk relasi dengan lahan hutan dan sumber daya hutan. Perempuan adat dan perempuan komunitas lokal memainkan peran penting dalam mengelola lahan hutan dan sumber daya hutan. Dalam memperoleh akses atas lahan hutan dan sumber daya hutan, perempuan adat dan perempuan komunitas lokal mendapatkan dan mempertahankan akses atas tanah dan sumber daya hutan dari para pihak yang memiliki kontrol melalui berbagai mekanisme, proses dan relasi sosial dengan berbagai pihak di berbagai tingkatan, mulai dari rumah tangga, keluarga besar, klan, komunitas, hingga negara (lihat Siscawati 2014, Siscawati dan Mahaningtyas 2012).

Posisi dan peran perempuan adat dan perempuan lokal dalam pengelolaan tanah dan sumberdaya hutan juga sangat dipengaruhi oleh pengelolaan hutan oleh pihak-pihak lain yang menguasai sumberdaya hutan dan sumberdaya alam lainnya di wilayah hidup mereka. Konsekuensi pengelolaan hutan yang dijalankan melalui proses dominasi dan ekstraksi sumber-sumber agraria dan

sumber daya alam lainnya berlangsung melalui dukungan kebijakan, pasar, pemaksaan melalui beragam bentuk kekuatan *(forces)* memberikan kontribusi bagi perubahan posisi dan peran perempuan adat dan perempuan lokal. Penyelenggaraan konsesi-konsesi kehutanan diselenggarakan dengan menghilangkan akses rakyat, termasuk di dalamnya perempuan dan kaum marjinal lainnya, atas tanah dan sumberdaya alam. Lebih jauh, proses dominasi dan ekstrasi tersebut menempatkan rakyat sebagai pihak yang dianggap tidak ada *(invisible).* Perempuan dan kelompok marjinal lain yang di komunitasnya sendiri memiliki posisi tawar yang lemah bahkan sering diangap tidak penting untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan komunitas menjadi pihak yang dua kali tidak terlihat *(double invisibility).* Pihak yang terlibat dalam perubahan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam tidak terbatas pada institusi dan aktor pemerintah maupun pasar, melainkan juga kerabat sendiri.

Secara umum diketahui bahwa konversi hutan, baik legal maupun illegal, memiliki dampak ekologis, sosial dan budaya. Yang menanggung beragam dampak tersebut adalah komunitas-komunitas yang hidupnya bergantung secara langsung pada hutan dan sumberdaya hutan. Sekali lagi perlu ditekankan di sini, komunitas-komunitas tersebut bukan entitas homogen, melainkan entitas heterogen yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dan di dalamnya terdapat perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Perubahan penguasaan atas wilayah hutan beserta sumberdaya hutan di dalamnya, dari tangan komunitas ke tangan pihak-pihak di luar komunitas, baik melalui mekanisme konversi hutan secara legal maupun illegal, akan berpengaruh bagi kehidupan perempuan dari berbagai kelompok sosial di dalam komunitas-komunitas yang bergantung pada hutan dan sumberdaya hutan.

Sehinggga menindak lanjuti pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati). Lalu PP No. 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan serta

Permenhut No. 49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa, Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Merupakan hierarki landasan yang digunakan kemudian untuk merancang sebuah program *Good Forest Governance* sebagai model strategi dalam pengelolaan hutan yang kemudian di spesifikan kembali menjadi KKP atau Konservasi Kesepakatan Pekon yang salah satu substansinya memuat terkait dengan *gender equality.*

Pengelolaan Hutan berbasis masyarakat (PHBM), yang berdasarkan PermenLHK No. 83/MENHLK/SETJEN/KUM.1/10/2016 berubah menjadi perhutannan sosial, merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraanya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk (Hutan Pekon, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanam Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Hutan). Kemunculan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) tentu akan melibatkan masyarakat di sekitar hutan secara langsung. Terlibatnya masyarakat akan menimbulkan perbedaan, terutama perbedaan gender. Dalam pengelolaan hutan laki-laki dan perempuan memiliki porsi peran yang berbeda-beda, baik dalam penentuan pekerjaan maupun kegiatan yang harus dijalankan dalam penngelolaan hutan, yaitu tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha (Listya, 2017).

Selaras dengan urgensi Isu Kesetaraan Gender dan Kelestarian Lingkungan dalam pengelolaan hutan. Berdasarkan Survey yang dilakukan penulis ditemukan fakta di lapangan, terdapat peran strategis perempuan di Desa Sukamarga Kec. Suoh Kabupaten Lampung Barat selain mengerjakan urusan domestik rumah tangga mereka juga berkerja dan berperan penting di hutan dan peran perempuan di sini juga sangat dominan untuk mengintervensi pihak laki-laki untuk mengikuti hal- hal strategis yang berkaitan dengan konservasi lingkungan yang sebelumnya sangat sulit diterapkan secara langsung seperti

menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam secara efektif dan efisien tanpa merusak ekosistem. (Bupati Lanpung Barat Hi Parosil Mabsus: 2018).

Dengan tujuan untuk mengelola sumber daya alam seperti hasil panen yang dikelola bersama kemudian dijadikan sebagai produk unggulan untuk desa tersebut dan dijadikan sebagai peluang usaha kelompok ibu-ibu rumahtangga untuk mendistribusikannya keluar daerah yang kemudian membantu perekonomian keluarganya dan kegiatan ini sangat didukung penuh oleh para suami yang notabenenya merupakan petani di hutan. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan kelompok simpan usaha teratai makmur dan kelompok usaha jati luhur yang memiliki tujuan yang sama yakni pengelolaan hasil hutan berkelanjutan. Dua kelompok ini terdiri dari para petani lokal laki-laki dan perempuan dengan fokus pengelolaan hasil hutan yang berbeda, untuk kelompok simpan usaha teratai makmur para petani hutan wanita ini bergabung membuat kelompok dan melakukan pemanfaatan hasil hutan yakni kopi dan coklat sedangkan untuk kelompok jati luhur yang terdiri dari para petani hutan pria lebih fokus pada pengelolaan hasil hutan non kayu seperti damar dan rempah-rempah. Selain itu adanya *gender equality* dalam pengelolaan hutan juga membantu menumbuhkan kesadaran Masyarakat untuk mulai menghentikan kegiatan yang sekiranya menggangu ekosistem kawasan TNBBS dan melarang para pemburu dan pelaku pembalakan liar untuk datang.

Kesetaraan Gender dan Konservasi Lingkungan merupakan satu kesatuan yang bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Desa yang berbasis pembangunan berkelanjutan atau SDGs(Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat: 2012). Aktor yang paling berperan besar dalam Pengimplementasian Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Kesepakatan Konservasi Pekon ini adalah Pemerintah Desa Sukamarga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis mengenai Peran Kesetaraan Gender dalam Pengelolaan Hutan pada Kesepakatan Konservasi

Pekon (KKP) untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang Isu Kesetaraan Gender dan Lingkungan . Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Konservasi Pekon (KKP) Untuk Mewujudkan *SDGs Village*"

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kesepakatan Konservasi Pekon (KKP) sudah memenuhi indikator Pengarusutaaman Gender ?
2. Apakah manfaat yang diperoleh dengan adanya Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Hutan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Hutan di Kesepakatan Konservasi Pekon .
2. Menganalisis manfaat yang diperoleh dengan adanya Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Hutan.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Secara Teoritis Penelitian ini memberikan sumbangan data terkait dengan Konservasi Lingkungan Berkelanjutan melalui Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan menjadi sebuah acuan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian Kegunaan secara Praktis, Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai Referensi Pengembangan Konservasi Lingkungan yang tepat oleh pemerintah Provinsi Lampung. Serta, dapat juga digunakan

sebagai bahan refernsi penentuan kebijakan yang tepat dalam Pengelolaan Konservasi Lingkungan Berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian dengan demikian penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitan penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 1 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
1	Arora-Jonsson, S., Agarwal, S., Pierce Colfer, C., Keene, S., Kurian, P., & Larson,A.(2019)	*SDG 5: Gender Equality – A Precondition for Sustainable Forestry.*	Secara umum hasil penelitian adalah terkait dengan pembahasan indikator SDGs poin ke 5 menjadi sebuah bukti bahwa dalam pengelolaan hutan yang baik tidak hanya menggunakan acuan yang selama ini diterapkan yakni manusia-hubungannya antar satu sama lain- dan alam yang alami	Terdapat kesamaan objek penelitian yakni pentingnya poin ke 5 dalam SDGs untuk pengelolaan hutan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitiansebelumnya terakit dengan Fokus penelitian penulis yakni peran perempuan dalam konservasi lingkungan

			menentukan hasil hutan. Dalam penelitian ini menyebutkan faktor-faktor sistemik dan konstekstual seperti kesehatan, Kesetaraan gender menjadi salah satu upaya untuk mesejahterakan hutan dan masayarakat yang bergantung dengan hutan	
2	Adinolf Giovanna i,et al. 2020	*International trade, investment, and the sustainable development goals*	Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pencapaian tujuan SDGs dapat menngunakan pendekatan publik yang kemudian berpusat pada Kesetaraan Gender dalam setiap	Terdapat kesamaan ruang lingkup yakni upaya dalam pencapaian tujuan SDGs dan Fokus ke poin 5. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terkait fokus dan juga lokusnya yakni berfokus pada peran penting perempuan dalam konservasi dan lokusnya di sebuah desa yang berbatasan langsung dengan kawasanMargasatwa.
3	Farida Noor Dessy (2019)	Pengaruh Diversitas Gender terhadap Pengungkapan SDGs	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan direksi pada perusahaan sampel tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs, salah satunya disebabkan	Kesamaan objek penelitian penulis yakni subjek penelitian tentang kesetaraan perempuan ditengah pengelolaan sumberdaya alam dan pembangunan berkelanjutan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian

			karena masih rendahnya representasi wanita dalam dewan direksi, dimana rata-rata jumlah dewan direksi wanita tidak lebih dari 3 orang. Sedangkan keberadaan dewan komisaris terbukti dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan SDGs lebih luas. Hal ini disebabkan karena dewan komisaris wanita memiliki peran penting dalam mendorong keberlanjutan kinerja dan keragaman gender dapat memiliki efek langsung dan terukur pada praktik kelestarian lingkungan perusahaan	sebelumnya lebih berfokus pada Gender dalam perusahan Sedangkan penulis berfokus pada Gender Lingkungan.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti dari Skripsi dan Jurnal, 2020

Berdasarkan perbandingan ketiga penelitian diatas, maka dapat dilihat terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Penelitian ini memiliki judul "*Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Konservasi Pekon (KKP) Untuk Mewujudkan SDGs Village*". Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis Penerapaan kebijakan PUG dalam KKP sebagai upaya perubahan perilaku masyarakat untuk menjadi lebih tanggap dan peduli

terhdapa konservasi lingkungan serta Peran penting kaum wanita dalam pengelolaan dan konservasi lingkungan.

Dalam penelitian ini untuk menganalisis peran penting kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan yang ditetapkan dalam Kesepakatan Konservasi Pekon (KKP) di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat yaitu dengan menggunakan model linier dan model interaktif (Baedhowi, 2004: 47). Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. yang meliputi indikator: Perencanaan Kebijakan, Kolaborasi Aktor dan *Outcomes.*

2.2.TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK

2.2.1 Kebijakan Publik

Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang sudah menetapkan daerahnya sebagai kabupaten Konservasi melalui Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2009 dan pengalokasian kebijakan-kebijakan terkait isu dan masalah yang ada di daerahnya diperuntukan dalam menyeselesaikan persoalan-persoalan yang telah menjadi masalah publik sehingga Pemerintah Kabupaten wajib untuk mengambil tindakan terkait penyelesaian permasalahan tersebut. Kebijakan publik dibuat untuk mengatasi berbagai macam isu atau masalah publik, pendefinisian masalah menunjuk pada adanya pembatasan masalah yang dilakukan oleh publik sendiri. Meskipun di kalangan masyarakat banyak terdapat isu atau masalah yang berbeda dan juga persepsi yang berbeda, namun pemerintah selaku pembuat kebijakan harus menentukan permasalahan mana yang lebih harus diutamakan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Isu atau masalah publik yang sudah ditentukan nantinya akan dikaji ulang tentang kelayakan kebijakan tersebut hingga di mana pada tahap pembuatan draf kebijakan, pejabat pemerintahan selaku pembuat kebijakan sudah mampu untuk menentukan target dan sasaran kebijakan agar kegagalan kebijakan tidak akan terjadi.

Menurut Nakamura dan Smallwood (dalam *Rist, chapter* 34:548), kebijakan adalah sebuah susunan instruksi dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana kebijakan dan diharuskan untuk mencapai tujuan dengan di lengkapi berbagai instrumen. Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing- masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.

Seperti yang dikemukakan oleh Anderson (1975), kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah : (1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. (2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah. (3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan. (4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. (5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Kebijakan publik menurut Anderson di atas dapat diklasifikasikan sebagai proses management, di mana di dalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar berindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). (Tangkilisan, 2003: 2)

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas maka kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu instrumen yang dIbuat oleh pemerintah yang berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu.

Tujuan kebijakan publik menurut Sugandi (2011:75-76) yaitu membentuk keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.Sebagai penyeimbang maka kebijakan publik dituntut harus memberikan rasa adil bagi semuanya.Rasa adil inilah yang sangat jarang dapat diberikan di Indonesia karena rasa adil ini untuk masyarakat yang termarjinal merupakan barang yang sangat mahal.Sedangkan manfaat kebijakan publik menurut Sugandi (2011:76) yaitu untuk menjelaskan berbagai fenomena kehidupan masyarakat secara lebih rasional dan legal. Dalam pembuatan kebijakan, berbagai proses pemanfaatan dari sumber daya yang ada di dalam negara perlu menjadi perhatian karena pemanfaatan ini biasanya yang menjadi peran penting dalam kondisi suatu bangsa. Proses pemanfaatan kebijakan publik untuk berbagai aktivitas sosial, politik, ekonomi, budaya, seni, teknologi, dan sebagainya adalah mengolah sumber-sumber yang ada menjadi sumber yang berguna untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sedangkan dalam merumuskan suatu kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh sebelum ditetapkan menjadi draf kebijakan. Tahapan kebijakan publik menurut menurut William Dunns (dalam Ginting & Noor, 2015:34-35) adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda

   Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya,

beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

   Maslaah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan *(policy alternatifs/policy options)* yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

   Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

   Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana *(implementor*), namun beberapa yang lain munkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dIbuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Nigro dan Nigro (dalam Anggara, 2014:174-175), ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Adanya Pengaruh Tekanan dari Luar

   Para Administrator sering harus membuat keputusan karena adanya tekanan dari luar, meskipun telah tersedia pendekatan pembuatan keputusan yang dinamakan *rational comprehensive* yang berarti bahwa administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan berdasarkan rasional. Proses dan prosedur pembuatan keputusan tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, menyebabkan adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap adanya pembuatan keputusan.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (*conservatisme*)

   Adanya kebiasaan lama organisasi cenderung akan diwarisi atau diikuti oleh para administrator yang baru walaupun keputusan yang berkenaan telak di kritik dan perlu diubah. Kebiasaan tersebut akan terus diikuti apabilah suatu kebijakan yang telah ada dipandang dapat memberikan hasil yang memuaskan.

c. Adanya Pengaruh Sifat-Sifat Pribadi

   Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan banyak dipengaruh oleh sifat-sifat pribadinya. Misalnya

dalah hal penerimaan atau pengangkatan pegawai baru seringkali faktor sifat pribadi pembuat keputusan memiliki peranan yang besar.

d. Adanya Pengaruh dari Kelompok Luar

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan. Karena seringkali pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dari ‘orang lain yang sebelumnya berada diluar bidang pemerintahan.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaaan yang terdahulu berpengaruh terhadap pembuatan keputusan. Karena orang sering membuat keputusan dengan tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggung jawabnya kepada orang lain karena khawatir jika wewenang dan tanggungjawab yang dilimpahkan akan disalahgunakan. Serta terdapat kekhawatiran akan pembuatan keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

2.3.IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

2.3.1 Implementasi

Implementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap seseuatu tersebut. Pengertian Implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Dibawah ini akan dijelaskan secara

singkat beberapa teori implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan sebuah hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan sutau implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin di raih.

Menurut Teori George C. Edward (dalam Subarsono, 2011: 90-92), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar *implementor* mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi imlpementasi.
b) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh *implementor*. Apabila *implementor* memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
d) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur

Organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape,* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasidari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan.

2.3.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (dalam Nurjamil SY: 2017), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi Kebijakan

   Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci,sarana-sarana dan penerapan prioritas,atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. **Kedua,** karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. **Ketiga,** kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. **Keempat,** penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya pembantu,misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

   Implemntasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan peranya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

   Pelaksaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada

pengimplementasiannya tidak cukup dukungan unutuk pelaksaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Menurut James Andrson (dalam Tangkilisan, 2003: 2), faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

1. Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hokum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
2. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hokum dan keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertidak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan system nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pemerintah atau Negara, sehingga apabila prilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif. Pressman dan Wildavsky (Laniari M: 2015) mengemukakan: *"Implementasi as to carry out, acoumplish fill full, produce, complete,"* maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Jadi secara etimologi implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil."

Sedangkan, Menurut Ricard Elmore, Lipsky, Hjem & O'Poter Implementasi Kebijakan dimulai dari mengidentifikasikan jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada merea tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang dimiliki. Selain itu, implementasi kebijakan didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untu mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Implementasi kebijakan ini diprakarsai langsung oleh masyarakat baik secara langsung ataupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat.

Table 2

Policy Instruments - Assumptions and Consequences

	Assumptions	Consequences
Mandates	(1) Action required regardless of capacity; good in its own right	Coercion required
	(2) Action would not occur with desired frequency or consistency without rule	Create uniformity, reduce variation Policy contains information necessary for compliance Adversarial relations between initiators, targets Minimum standards
Inducements	(1) Valued good would not be produced with desired frequency or consistency in absence of additional money	Capacity exists; money needed to mobilize it As tolerable range of variation narrows, oversight costs increase
	(2) Individuals, agencies vary in capacity to produce; money elicits performance	Most likely to work when capacity exists
Capacity-building	(1) Knowledge, skill, competence required to produce future value; or	Capacity does not exist; investment needed to mobilize it
	(2) Capacity good in its own right or instrumental to other purposes	Tangible present benefits serve as proxies for future intangible benefits
System-Changing	(1) Existing institutions, existing incentives cannot produce desired results	Institutional factors incites action; provokes defensive response
	(2) Changing distribution of authority changes what is produced	New institutions raise new problems of mandates, inducements, capacities

Gambar 1. Instrumen Kebijakan

Sumber. Laniari M: 2015

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir *(output)*, yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Pemetaan ke depan adalah strategi yang paling mudah dilakukan ke pikiran ketika seseorang berpikir tentang bagaimana pembuat kebijakan mungkin mencoba untuk mempengaruhi proses implenetasi. Hal ini dimulai dengan

bagian proses yang mencoba untuk menentukan urutan langkah-langkah yang semakin spesifik untuk menentukan apa yang diharapkan dari para pelaksana pada stiap tingkat para pelaksana. Sedangkan Pemetaan Maju dimulai dengan pernyataan suatu lembaga untuk menguraikan peraturan lembaga dan tindakan administratif yang konsisten untuk dapat menguraikan pembagian tanggungjawab antara pusat dan daerah.

Yang paling serius masalah dengan pemetaan ke depan adalah asumsi implisit dan tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa pembuat kebijakan mengontrol proses organisasi, politik, dan teknologi yang mempengaruhi implementasi. Administrator melegitimasi keputusan diskresi mereka dengan mengatakan bahwa wewenang mereka didelegasikan dan dikendalikan oleh orang-orang yang dipilih dan diangkat pembuat kebijakan. Analis kebijakan membenarkan keberadaan mereka dengan menyatakan bahwa informasi,pilihan rasional oleh pembuat kebijakan diperlukan untuk memandu dan mengendalikan lembaga tingkat atas. Baik administrator maupun analis kebijakan tidak merasa nyaman dengan kemungkinan bahwa sebagian besar dari apa yang terjadi dalam proses implementasi tidak dapat dijelaskan oleh maksud dan arah pembuat kebijakan. Dengan mengasumsikan bahwa arahan kebijakan yang lebih eksplisit, perhatian yang lebih besar pada adalah tanggung jawab lembaga tingkat atas, dan pernyataan yang lebih jelas tentang hasil yang diinginkan akan meningkatkan implementasi, pemetaan ke depan memperkuat mitos bahwa implementasi tasi dikendalikan dari atas. Dan mungkin penjelasan yang meyakinkan untuk kegigihan pemetaan ke depan dalam menghadapi objeknya keterbatasan utama adalah kurangnya alternatif yang cocok. Ini adalah satu hal yang harus dihargai intuitif bahwa pembuat kebijakan mungkin tidak melakukan kontrol yang menentukan atas dampak proses plementasi; itu adalah hal lain untuk merumuskan strategi analitik yang konsisten dengan intuisi itu. Pemetaan ke belakang berbagi dengan pemetaan ke depan gagasan bahwa pembuat kebijakan memiliki

kepentingan yang kuat dalam mempengaruhi proses implementasi dan hasil keputusan kebijakan.

Tetapi pemetaan ke belakang secara eksplisit mempertanyakan asumsi bahwa pembuat kebijakan harus, atau melakukan, menggunakan faktor penentu mempengaruhi apa yang terjadi dalam implementasi. Menerapkan pemetaan maju dan mundur untuk masalah yang sama memberikan banyak perbedaan hasil yang berbeda. Solusi analitik yang ditawarkan oleh pemetaan ke depan menekankan faktor yang cenderung memusatkan kontrol dan yang mudah dimanipulasi oleh pembuat kebijakan: formula pendanaan; struktur organisasi formal; hubungan otoritas antar unit administrasi; peraturan; dan pengendalian administratif (anggaran, perencanaan, dan persyaratan evaluasi).

Solusi analitik yang ditawarkan oleh pemetaan mundur menekankan penyebaran kontrol dan berkonsentrasi pada faktor-faktor yang hanya dapat dipengaruhi secara tidak langsung oleh pembuat kebijakan: pengetahuan dan kemampuan pemecahan masalah dari administrator tingkat bawah; struktur insentif yang beroperasi pada subyek kebijakan; hubungan tawar-menawar antara aktor di berbagai tingkat proses implementasi; dan penggunaan strategis dari dana untuk mempengaruhi pilihan diskresi. Perbedaan penting dari perspektif berasal dari apakah seseorang memilih untuk mengandalkan terutama pada perangkat komando formal dan kontrol yang memusatkan otoritas atau pada perangkat informal delegasi dan diskresi yang membubarkan otoritas. Aktor yang terlibat dalam memilih pendekatan analitik lebih jelas ketika mereka diletakkan dalam konteks pemikiran terkini tentang implementasi.

Sebagai literatur tentang implementasi telah terakumulasi, masalah tertentu telah muncul yang menunjukkan konsekuensi, baik intelektual maupun praktis,sehingga untuk melihat implementasi yang baik adalah sebagai proses yang tersusun secara hierarkis atau sebagai proses yang tersebar dan

proses desentralisasi. Selain itu, Logika pemetaan mundur dalam semua hal penting, kebalikan dari pemetaan ke depan. Ini dimulai bukan di bagian atas proses implementasi tetapi di tahap terakhir yang mungkin, titik di mana tindakan administratif berpotongan pilihan pribadi. Itu dimulai bukan dengan pernyataan niat, tetapi dengan pernyataan tentang perilaku spesifik pada tingkat terendah dari proses implementasi yang menimbulkan kebutuhan akan suatu kebijakan.

Hanya setelah perilaku itu dijelaskan, barulah analisis menganggap untuk menyatakan tujuan; tujuannya pertama kali dinyatakan sebagai satu operasi organisasi dan kemudian sebagai serangkaian efek, atau hasil, yang akan hasil dari operasi ini. Setelah menetapkan target yang relatif tepat ditingkat terendah dari sistem, analisis mendukung melalui struktur im-lembaga pelengkap, mengajukan pada setiap tingkat dua pertanyaan: Apa kemampuan? unit ini untuk mempengaruhi perilaku yang menjadi sasaran kebijakan? Dan apa sumber daya yang dibutuhkan unit ini untuk memiliki efek itu Pada tahap akhir.

Analisis atau pembuat kebijakan menggambarkan kebijakan yang mengarahkan sumber daya di unit organisasi cenderung memiliki efek terbesar. Meskipun pemetaan ke belakang mengambil perspektif pembuat kebijakan tentang proses implementasi, tidak menganggap bahwa kebijakan adalah satu-satunya atau bahkan pengaruh besar pada perilaku orang-orang yang terlibat dalam proses. Lebih jauh-lebih, itu tidak bergantung pada kepatuhan dengan maksud pembuat kebijakan sebagai standar dar keberhasilan atau kegagalan. Ini menawarkan sebagai gantinya standar kesuksesan yang ada di semua menghormati bersyarat; yaitu, definisi kesuksesan seseorang didasarkan pada perkiraan keterbatasan kemampuan aktor pada satu tingkat pro-akses untuk mempengaruhi perilaku aktor di tingkat lain dan pada kemampuan yang terbatas limited organisasi publik secara keseluruhan untuk mempengaruhi perilaku pribadi. Pemetaan ke

depan mengasumsikan bahwa unit organisasi dalam implementasi proses terkait dalam hubungan yang pada dasarnya hierarkis. (Elmore, 2015)

2.4.IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUG

2.4.1 Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender *(Gender Mainstreaming)* merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotipe, subordinasi, kekerasan dan beban ganda). Sesuai dengan Inpres No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional, pengertian Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyususnan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Menurut Omas Ihromi dalam Hak Azasi Perempuan (2005), tujuan pengarusutamaan gender adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender berfungsi untuk menciptakan mekanisme-mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat dan pemerintahan

2.4.2 Kebijakan Penagarusutamaan Gender Dalam Lingkungan

Persoalan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan merupakan isu hangat dunia modern. Sejak abad XX, hampir seluruh penduduk dunia dihadapkan pada kenyataan munculnya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, banjir, kekeringan, dan juga keberlanjutan penghidupan masyarakat. Bahkan, *proliferasi* kerusakan lingkungan telah mencapai batas-batas toleransi dan kemampuan adaptasi lingkungan karena dampaknya yang tidak lagi sebatas lokal, melainkan bersifat global.

Pada saat paparan dampak perubahan lingkungan memasuki suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat, maka mendudukkan perubahan iklim dalam perspektif sosiologis menjadi penting, termasuk perspektif gender, karena pada kenyataanya perubahan iklim tidak hadir pada ruang kosong, melainkan hadir di tengah ruang sosiologis dan politis yang di dalamnya terdapat relasi gender. Dengan demikian, kita tidak bisa mengabaikan *interplay* antar keduanya (gender dan perubahan iklim). Pada konteks dimana telah terjadi relasi gender yang timpang, maka perubahan iklim akan dirasakan berbeda dampaknya antara laki-laki dan perempuan. Pada konteks dimana telah terjadi relasi gender yang timpang, maka perubahan iklim akan dirasakan berbeda dampaknya antara laki-laki dan perempuan.

United Nation Habitat (UN Habitat), juga menyebutkan bahwa pada kondisi terpapar dampak perubahan iklim, maka dampaknya dirasakan berbeda untuk masing-masing kelompok, seperti misalnya kelompok minoritas yang terpinggirkan, laki-laki dan perempuan (relasi gender), orang tua dan anakanak. Hal ini disebabkan antara laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda di dalam keluarga, dan memiliki persepsi yang berbeda tentang bencana.

Laporan KIARA dan *Climate Justice* menjelaskan bahwa pada saat terpapar dampak perubahan Lingkungan dan Iklim, perempuan akan menanggung beban ganda. (Rusmandi. 2016). Di beberapa wilayah pesisir misalnya, selain bertanggungjawab pada urusan domestik, perempuan juga menjadi tumpuan dan bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga dengan membantu suami untuk memperoleh pendapatan tambahan. Perubahan cuaca ekstrim telah membuat banyak penurunan penghasilan nelayan, sehingga perempuan menjadi ikut membantu memikul beban laki-laki. Bagi perempuan di kawasan taman nasional bukit barisan selatan, perubahan lingkungan menyebabkan berkurangnya produktivitas hasil panen dan timbulnya berbagai macam masalah seperti longsor dan banjir. Selain itu, kerusakan kawasan yang sebabkan oleh pembalakan liar dapat memicu terjadinya konflik antar masyarakat dengan satwa-satwa langka yang

menyebabkan masyarakat tidak berani berangkat kedalam kawasan dan hanya menganggur di rumah. Hal ini, yang kemudian menyebabkan pihak wanita harus bertanggungjawab untuk mencari nafkah melalui peluang lain. (Rodernberg, B: 2009)

Selain bertanggungjawab pada urusan domestik dan sekaligus ikut bekerja membantu ekonomi keluarga, perempuan juga mengalami kesulitan tambahan di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestiknya, seperti misalnya memasak, mencuci, memandikan anak, dan membersihkan rumah. Pada saat yang sama, perempuan juga tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam menghadapi perubahan lingkungan. Hal ini disebabkan karena minimnya akses perempuan dalam aspek sosial-ekonomi, dan politik yang menyebabkan perempuan lebih rentan ketika terpapar dampak perubahan Lingkungan.

Perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan turut mempengaruhi perbedaan tingkat kerentanan di antara keduanya. Pada konteks dimana telah terdapat relasi gender yang timpang, maka perubahan iklim akan memunculkan kerentanan lebih pada kelompok gender yang termarginalkan, yakni perempuan. Pada konteks dimana perempuan telah menjadi kelompok yang lebih rentan akibat terpapar dampak perubahan Lingkungan, maka diperlukanya pengimplemntasian kebijakan yang responsif gender dalam setiap Kebijakan. Sebuah kebijakan yang memposisikan perempuan secara equal dalam kontek ketahanan perubahan Lingkungan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi level kesadaran gender yang dimiliki oleh suatu kota, maka semakin tinggi pula kualitas kebijakan perubahan Lingkungan di suatu kota. Sebaliknya, kegagalan memasukan perpsektif gender dalam kebijakan ketahanan perubahan lingkungan akan semakin menambah beban dan resiko perubahan lingkungan bagi kelompok yang lebih rentan.

2.5.PENGARUSUTAMAN GENDER SDGs

Fokus Tujuan (Goal) 5 sesuai dengan outcome document PBB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Untuk mencapai kemajuan keseluruhan target, kesetaraan gender menjadi dasar. Pemberdayaan perempuan, dan anak perempuan memegang peranan penting. Karena tujuan-tujuan SDGs tidak akan tercapai jika meninggalkan lebih dari separuh kelompok manusia ini. Tujuan ke 5 yang menjelaskan mengenai *Gender Equality* atau Kesetaraan Gender juga berkaitan dengan Hak Asasi bagi setiap perempuan.Pelarangan diskriminasi atas dasar jenis kelamin telah dinyatakan di dalam seluruh instrumen di bawah *International Bill of Human RIghts*, yang terdiri dari Deklarasi Universal HAM *(Universal Declaration of Human Rights/UDHR), Kovenan Internasional* tentang Hak Sipil dan *Politik (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR),* dan *Kovenan Internasional* tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya *(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR).*

2.6.KESEPAKATAN KONSERVASI PEKON (KKP SUKAMARGA)

Kesepakatan Konservasi Pekon (KKP) adalah sebuah program yang berbasis kerjasama dengan NGO *World Wide Fund For Nature* yang subtansinya terkait dengan konservasi lingkungan serta gender equality dalam pengelolaan hutan. KKP ini merupakan salah satu program yang lahir dari pengesahan kebijakan internasional yakni Environment and Gender Index (EGI), yang dikembangkan International Union for Conservation of Nature (IUCN),. Lalu penetapan PP No. 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan serta Permenhut No. 49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa, Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak sebagai tindak lanjut dari kebijakan internasional ke kebijakan nasional. Kemudiandari 2 kebijakan diatas lahirlah sebuah program nasional yakni *Good Forest Governance* yang kemudian ditetapkan sebagai model strategi dalam pengelolaan hutan yang kemudian di spesifikan kembali untuk daerah menjadi KKP atau Konservasi Kesepakatan Pekon yang salah satu substansinya memuat terkait dengan gender equality.

KKD/KKP merupakan sebuah pernyataan komitmen dari warga desa untuk mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan hal ini juga dikhusukan sebagai upaya melindungi kawasan hutan negara yang berbatasan dengan desa seperti di Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan juga TNBBS. Selaras dengan tujuan KKP diatas, komitmen yang telah didiskusikan tersebut kemudian dituangkan menjadi butir-butir kesepakakatan yang diwujudkan dalam sebuah peraturan dan dokumen yang telah disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat secara langsung.

2.7.DESA SDGs

SDGs Desa ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Dalam Perpres itu disebutkan ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Sementara SDGs desa menambahkan satu tujuan lagi. Artinya, SDGs desa memiliki 18 tujuan pembangunan berkelanjutan desa. Keistimewaan SDGs desa terletak pada butir ke-18. Di mana pembangunan desa harus berlandaskan pada kebudayaan lokal atau kearifan lokal yang ada di desa itu.

Upaya pencapaian SDGs Desa ini dalam situasi dan kondisi pandemi *Covid 19* tidaklah mudah karena itu, penggunaan dana desa tahun2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasioan, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasan baru desa. Adapun 10 SDGs dimaskud dalam situasi dan kondisi pandemi adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat sejahtera
4. Keterlibatan perempuan desa
5. Desa bernergi bersih dan terbarukan
6. Pertumbuhan ekonomi desa merata
7. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
8. Desa damai berkeadilan

9. Kemitraan untuk pembangunan desa dan
10. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

2.8.KERANGKA PENELITIAN

Kesepakatan Konservasi Pekon merupakan suatu bentuk kesepakatan yang kemudian ditetapkan menjadi program yang fokus pada konservasi lingkungan dan *gender equality*. Dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat sebelum adanya Implementasi Pengarusutamaan Gender ini mengalaami berbagai masalah yang terus berulang-kali terjadi pada kawasan hutan. Seperti, banyaknya kasus Pembalakan liar, Pembukaan lahan dikawasan, Eksploitasi Satwa dan sumberdaya alam serta Konflik anatara pemilik kawasan dengan masyarakat terkait dengan sengketa Tanah, serta diskriminasi terkait kesempatan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan kesempatan untuk mendapatakan pengetahuan terkait pengelolaan hasil hutan dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan.

Dengan adanya Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Hutan Pada Kesepakatan Konservasi Pekon (KKP) akan dikaji menggunakan Teori Ricard Elmore yang mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat didalam proses implementasi dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang dimilki. Teori ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyrakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pemerinta, namun hanya di tataran bawah.

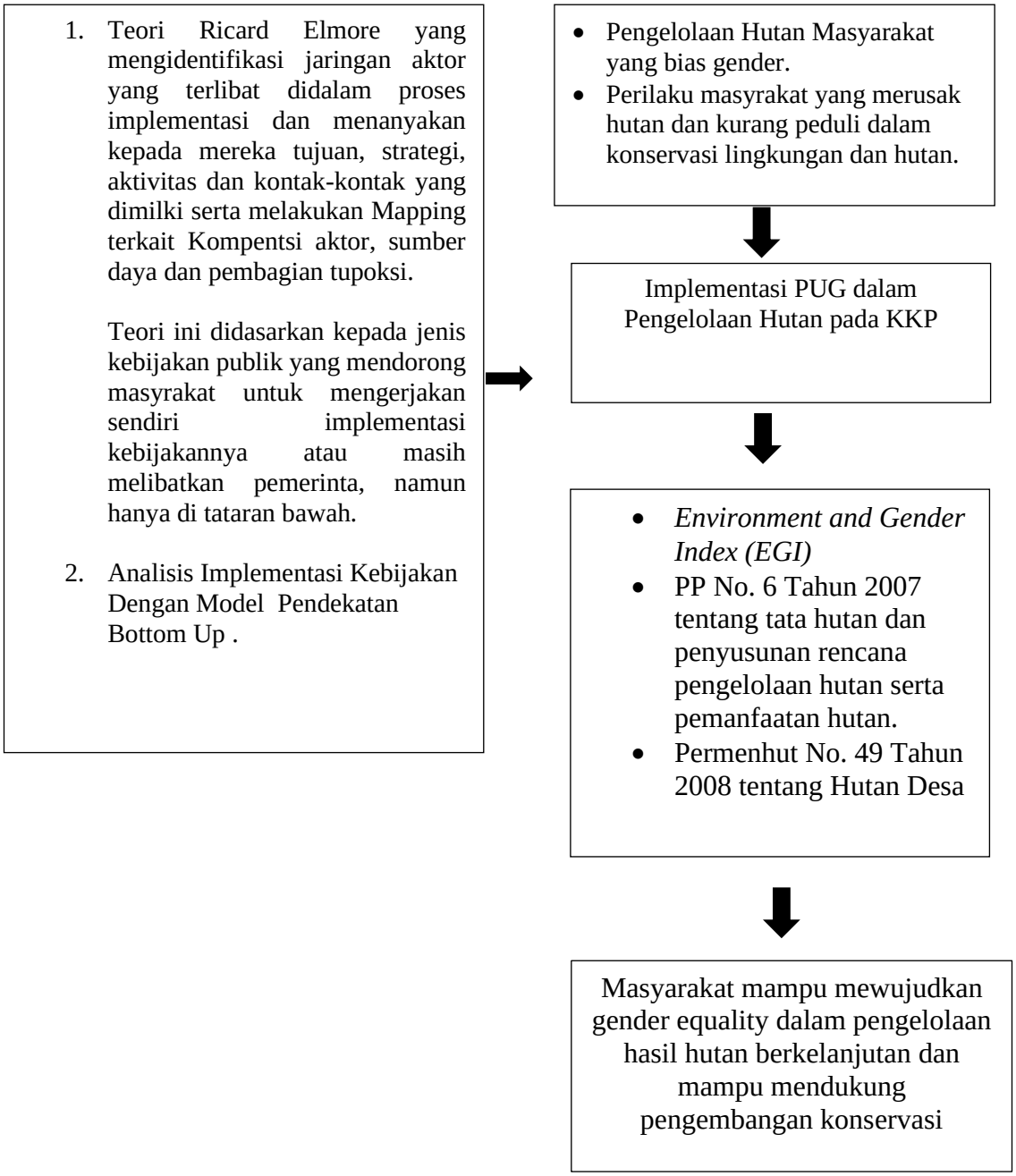

Gambar 2 Kerangka Pemikiran

Sumber :Diolah Oleh Peneliti 2020

III. METODE PENELITIAN

3.1.TIPE DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian menggambarkan tentang suatu keadaan secara obyektif dengan menggunakan prosedur penelitian yang bersifat deskriptif yang datanya berupa kata-kata tertulis dan gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen. Sementara definisi pendekatan kualitatif menurut Moleong (dalam Nurdin Ismail & Sri Hartati, 2019:75), adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan dan mencoba untuk menggambarkan keadaan secara obyektif yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya, mengenai penerapan sistem pada Kebijakan PUG di Pekon Sukamarga Lampung Barat.

3.2.FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan Teori Implementasi yang digunakan oleh penulis dari Ricard Elmore yang menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya.

Implementasi kebijakan ini diprakarsai langsung oleh masyarakat baik secara langsung ataupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Penelitian ini mengkaji Implementasi PUG dalam Pengelolaan Hutan Pada Kesepakatan Konservasi Pekon di Kecamatan, Suoh Kabupaten, Lampung Barat dengan berfokus kepada Identifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang dimiliki serta Perubahan yang dapat dilihat setelah dan sebelum adanya Penerapan PUG dalam Pengelolaan Hutan pada Kesepakatan Konseervasi Pekon (KKP).

Dengan kesimpulan akhir, Meningkatkan kemampuan para kelompok usaha petani hutan dalam melakukan pengelolaan hasil hutan berkelanjutan melalui kegiatan usaha serta mewujudkan gender equality dan mendukung konservasi lingkungan.

3.3.LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan Pekon Sukamarga, Suoh yang merupakan lokasi utama penelitian. Hal ini disebabkan karena baru pekon ini yang pertama kali mencoba menerapakan kebijakan ini dalam KKP. Dan lokasi kedua adalah NGO-WWF yang merupakan pengagas utama dalam penciptaan ide program dan peroses penetapan kebijakan ini.

3.4.JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN

Terdapat dua jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

1. **Data Primer**

   Data primer merupakan data yang diperoleh melalui hasil observassi maupun wawancara dengan informan/narasumber pada partisipan/lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan informan. Teknik penarikan sampel ini berorientasi pada pemilihan sampel dengan populasi dan tujuan spesifik dari penelitian yang diketahui oleh peneliti sejak awal (Winarni, 2018:56).

Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mendeskripsikan sistem yang diterapkan pada Kebijakan PUG dalam KKP di Pekon Sukamarga. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2 Informan Penelitian

No	Informan	Informasi
1.	Pemerintahan Desa Pekon Sukamarga	Peranan penyelenggara dalam penerapan sistem pada Kebijakan PUG dalam KKP
2.	Masyarakat Desa dan Adat	Perananan pelaksanaan Kebijakan PUG
3.	Pemerintah Daerah Lampung Barat	Peranan Pengelola dan Penetapan Kebijakan PUG dalam KKP
4.	Project Leader WWF	Peranann Penyusunan, Pengelola dan penerapan Kebijakan PUG dalam KKP

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2020.

2. **Data Sekunder**

   Data sekunder merupakan data yag diperoleh secara tidak langsung terkait dengan objek penelitian. Data sekunder berupa data pendukung yang bersumber dari literatur maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan objek atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis,

arsip maupun gambar yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan PUG dalam KKP. Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari pihak pengelola Kebijakan PUG dalam KKP di pekon sukamarga.

3.5.INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen atau alat penelitian digunakan untuk membantu pengumpulan data dalam penelitian. Dalam metode kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data yang tidak dapat diwakilkan atau didelegasikan yang berarti bahwa peneliti terlibat langsung dengan partisipan. Maka kompetensi peneliti mengenai topik yang akan diteliti merupakan hal yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif. Adapun hal dilakukan peneliti sebagai instrumen penelitian dalam penelitian ini yakni melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan peran aktif dari peneliti, selain itu peneliti menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang bersifat terbuka dan menggunakan alat bantu lainnya (buku catatan, *tape recorder*, pensil, dan lain-lain).

3.6.TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber daya dan berbagai cara (Winarni, 2018:158). Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. **Observasi**

   Pengamatan atau observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi atau data menggunakan pancaindera. Pengamatan merupakan salah satu metode yang paling penting dari pengumpulan data dalam pengamatan, instrumen penelitian utama adalah diri (peneliti) yang mengumpulkan data dengan bantuan penglihatan, pendengaran, rasa, bau, dan sentuhan (Moleong 2016:239). Peneliti melakukan observasi dalam penerapan PUG dalam program KKP dengan mengikuti 3 kegiatan utama yang dilakukan yakni Melakukan kegiatan Reboisasi/ Rehabilitasi yang

diawali dengan kegiatan sosialisasi terkait dengan penyelamatan daerah aliran sungai lalu dilanjutkan dengan penanaman kembali pada lahan gundul untuk mengurangi degradasi hutan.

Selanjutnya, penulis bersama dengan stakeholder lainnya melakukan observasi secara partisipatoris terkait dengan pengembangan ekowisata dan dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan untuk peningkatan pendapatan masyarakat terkait pengembangan usaha pada padi dan kakao

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan berhadapan secara langsung, tetapi dapat juga diberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab di kesempatan lain. Teknik wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan datang langsung ke tempat-tempat yang menjadi sumber informan penelitian. Untuk itu, pewawancara melakukan penyusunan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pikiran mengenai berbagai informasi yang akan digali dari informan. Dalam hal ini, penulis melakukan kegiatan wawancara bersama dengan stakeholder yang terlibat seperti pihak dari NGO yang membantu pelaksanaan program dan masyarakat yang menjadi pelaksana pada program KKP ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, studi ini merupakan pelengkap dari penggunaaan observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen, arsip-arsip yang berkaitan dengan Kebijakan PUG dalam KKP.

3.7.TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistemaris data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2016: 244). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles dan Huberman (dalam Winarni, 2018:171), meliputi pengumpulan informasi, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya (Winarni, 2018:172). Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Dalam tahapan ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian penerapan sistem pada Kebijakan PUG dalam KKP dan mana yang bukan. Kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan Kebijakan PUG dalam KKP.

Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, gambar, foto dan sejenisnya (Winarni, 2018:173). Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami

pelaksananaan program ini, serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data

Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yakni penarikan kesimpulan. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan biasanya masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Adapun kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Winarni, 2018:174). Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan terkait pertemuan 2 indikator SDGs poin 5 dan 15 yang kemudian menghasilkan Peran Penting kaum peremouan dalam pengelolaan hutan yang kemudian menimbulkan perubahan perilaku baru pada masyarakat secara keseluruhan ke arah yang lebih baik dalam kegiatan konservasi lingkungan.

3.8.TEKNIK KEABSAHAN DATA

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) (Winarni, 2018:179). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh.

Penentuan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan kriteria. Berikut

kriteria dalam menentukan keabsahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu : derajat kepercayaan (*credibility*)

1. **Triangulasi**

   Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Ada tiga macam triangulasi menurut Wiersma (dalam Winarni, 2018:183), yaitu: 1) triangulasi sumber berarti menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, 2) triangulasi teknik meliputi pengecekan data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, 3) triangulasi waktu yakni pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain untuk pengecekan dalam waktu dan situasi yang berbeda.

   Dalam penelitian ini, peneliti melakukan derajat kepercayaan menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Winarni, 2018:184). Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah dengan cara melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni, Pemerintah Desa, Kabupaten, Masyarakat dan NGO. Observasi yang dilakukan pada saat peneliti turun ke lapangan serta dokumentasi yang didapatkan dari Pekon Sukamarga Lampung Barat.

2. **Meningkatkan Ketekunan**

   Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan bekesinambungan (Winarni, 2018:182). Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil deskripsi serta pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi kebijakan PUG dalam KKP untuk mewujudkan SDGs Village, maka peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa:

a. Implementasi kebijakan PUG dalam KKP untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, keseimbangan peran dalam pengelolaan hutan dan pelestarian lingkungan hutan dalam kawasan TNBBS dan mereboisasi/ merehabilitasi lahan-lahan kritis pada kawasan TNBBS dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan lapangan yang telah dilakukan oleh pemerintah pekon bersama stakholders serta peningkatan modal pada KSU yang terus bertambah bisa menjadi salah satu hal yang memperlihatkan bahwa kebijakan ini diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat pekon sukamarga.
b. Permasalahan yang ada di dalam Program KKP ini berupa permasalahan terkait dengan masih terdapat beberapa masyarakat yang masih berpergang teguh dengan tradisi dan kepercayaan nenek moyang sehingga tidak ingin mengikuti kegiatan ini. Namun, setelah dilakukan diskusi bersama dengan tokoh adat dan peratin akhirnya minoritas masyarakat ini pada akhirnya bergabung hal ini disebabkan karena hutan adat mereka yang mulai di batasi oleh TNBBS dan mereka tidak

memiliki hak mutlak yang bisa digunakan untuk mempertahankannya sehingga setelah dijelaskan oleh peratin bahwa dalam substansi KKP ini mengatur hal terakit permsalahan tersebut sehingga minoritas masyarakt ini yang awalnya menolak jadi ikut mendukung dan menjalankan kegiatan dari program KKP ini.

c. Tahap analisis dari implentasi kebijakan ini menggunakan teori Ricard Elmore yang dimana perlunya identifikasi aktor yang terlibat di dalam proses implementasi dan membangun jaringan aktor yang efektif untuk mendorong masyarakat mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau melibatkan pemerintah namun hanya ditataran bawah dan juga melakukan 2 pemetaan kedepan dan kebelaakang terkait dengan pembagian tupoksi yang imbang, sumberdaya yang ada dan skill yang dimiliki oleh aktor untuk mempengaruhi subjek sasaran kebijakan. Dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwsannya kolaborasi aktor yakni pemerintah desa, NGO dan masyarakat berperan utama dalam pencapaian keberhasilan dari implementasi kebijakan ini. Selain itu, pemetaan kedepan yang dilakukan dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwasannya sudah dibentuknya berbagai satuan tugas untuk membantu memonitoring proses implementasi kebijakan PUG dalam KKP ini.

Sehingga pembagian tupoksinya efektif dan imbang. Lalu, untuk pemetaan kebelakangnya berkaitan dengan skill dan sumber daya yang ada yang kemudian dipenuhi dan dimiliki oleh para aktor dalam proses

implementasi kebijakan dalam penellitian ini sehingga cukup mudah membuat para subjek sasaran untuk dapat mengimplemntasikan kebijakan PUG dalam KKP ini dengan baik dan berkelanjutan.

5.2. SARAN

a) Pemerintah Pekon seharusnya lebih konsisten lagi dalam mengadakan Kegiatan penyuluhan dan Kegiatan pendidikan non formal, misalnya pelatihan di bidang ekonomi perlu dilakukan secara intensif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat yang ada di lokasi tersebut.

b) Program KKP ini sebaiknya di formulasikan kembali dengan baik karena dalam perjalananya akan terdapat beberapa perubahan yang terjadi baik dari masyarakat, stakeholders maupun dari ekosistem dalam hutan itu sendiri. Sehingga, jika sudah ada rencana akan direvisi kembali dapat menjadi langkah awal waspada yang dapat digunakan masyarakat dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga kedepannya.

c) Dalam masa pandemi seperti ini Pemerintah pekon bersama stakeholders pelu mengadakan monitoring dan evaluasi menggunakan sistem baru yang lebih modern dan ramah lingkungan seperti misalnya melakukan kegiatan monitoring dan evalusi ini dengan cara zoom meeting dengan menyampaikan segala kegiatan yang telah dilakukan dan maslaah serta capaian dalam kurun waktu 2 bulan lalu setelah kegiatan setiap kelompok harus melaporkan hasil kerjanya dengan cara membuat log book activity dan short video terkait kegiatan yang dilakukan.

d) Perlunya Analisis kebijakan yang tepat dalam setiap pelaksaan suatu implementasi kebijakan. Sehingga, nanti pada saat Mapping terkait dengan

aktor, sumber daya, dan skill sudah terpenuhi, ini akan mempermudah para aktor untuk melaksanakan kebijakan ini dengan baik dan tepat sasaran juga berkelanjutan. Selain itu, perlunya mapping topografi,vegetasi dan sosial masyarakat terlebih dahulu untuk penetapan kebijakan PUG ini dalam KKP karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara Sahya. 2018. Kebijakan Publik. Pustaka Setia: Bandung

Arora-Jonsson, S., Agarwal, S., Pierce Colfer, C., Keene, S., Kurian, P., & Larson, A. (2019). SDG 5: Gender Equality – A Precondition for Sustainable Forestry. In P. Katila, C. Pierce Colfer, W. De Jong, G. Galloway, P. Pacheco, & G. Winkel (Eds.), *Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People* (pp. 146-177). Cambridge: Cambridge University Press.

Beverelli, C., Kurtz, J., & Raess, D. (Eds.). (2020). International Trade, Investment, and the Sustainable Development Goals: World Trade Forum. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108881364

Bunge, M., Gago, F., & San Luis, A. (2018). Local Concepts in SDG. In *Synthetic Differential Topology* (London Mathematical Society Lecture Note Series, pp. 89-105). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108553490.010.

Fredman, S., Kuosmanen, J., & Campbell, M. (2016). Transformative Equality: Making the Sustainable Development Goals Work for Women. *Ethics & International Affairs, 30*(2), 177-187. doi:10.1017/S089267941600006X

In C. Beverelli, J. Kurtz, & D. Raess (Eds.), *International Trade, Investment, and the Sustainable Development Goals: World Trade Forum* (pp. 109-174). Cambridge: Cambridge University Press..

Kusomo Budi Andriani Rani Dkk. 2017. Edukaso Ramah Lingkungan : Perspektif Gender dalam Agribisnis Ekologis. Universitas Padjajaran.

P Purna Tri Muhammad. 2017. Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Pengarusutaam Gender di Sulawesi Selatan. Universitas Hasanudin

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Berbasisi Masyarakat.

Peraturan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.3/IV-SET/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan

Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.31/MENLHK/SETJEN/ SET.1/5/2017

Peraturan Mentri Desa Nomor 6 Tahun 2020

Rusmandi.2016.Pengarustamaan Gender dalam Perubahan Iklim Indonesia. Universitas islam Negeri walisongo, Semarang

Satterthwaite, D. (2018). Who Can Implement the Sustainable Development Goals in Urban Areas? In T. Elmqvist, X. Bai, N. Frantzeskaki, C. Griffith, D. Maddox, T. McPhearson, et al. (Eds.), *Urban Planet: Knowledge towards Sustainable Cities* (pp. 408-410). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781316647554.037

Sayer, J., Sheil, D., Galloway, G., Riggs, R., Mewett, G., MacDicken, K., Edwards, D. (2019). SDG 15: Life on Land – The Central Role of Forests in Sustainable Development. In P. Katila, C. Pierce Colfer, W. De Jong, G. Galloway, P. Pacheco, & G. Winkel (Eds.), *Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People* (pp. 482-509). Cambridge: Cambridge University Press.

Sembiring, S.N dan H, Fristy. 1999. Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Indonesia Center for Eviroment Law (ICEL). Jakartaa

TP Muhammad. 2017.“Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Selatan”. Universitas Hassanudin.

Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak.2017. Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan dan Politik. Universitas Islam Negeri Walisongo

United Nations Habitat, Cities and Climate Change; Global Report on Human Settlements 2011, United Nations Human Settlements Programme, (London: Earthscan Publishing, , 2011, h.

Widayani Ni Made Diska, Hartati Sri. 2014. Kesetaraan dan Keadilan dalam Pandangan Perempuan Bali. Universitas Diponegoro. Semarang

Winarno, Budi, 2002. Apakah Kebijaksanaan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.

Yale University, Enviromental Perfomrnace Index